

Nomor : B/251/AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2021

7 Maret 2022

Yth. Bupati Bangka

di

Sungailiat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kabupaten Bangka. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka memperoleh nilai **72,27** atau predikat **BB**. **Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah cukup memadai jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya.** Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Bangka sudah berjalan dengan sangat baik namun sangat perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,57	23,75
b.	Pengukuran Kinerja	25	18,00	18,15
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,30	10,40
d.	Evaluasi Internal	10	6,37	6,53
e.	Capaian Kinerja	20	13,26	13,44
	Nilai Hasil Evaluasi	100	71,60	72,27
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Pemerintah Kabupaten Bangka telah menerapkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik, meskipun terjadi perbaikan kualitas jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejumlah rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (LHE) Tahun 2020, belum seluruhnya dapat diselesaikan sampai saat ini.

Beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi AKIP di Pemerintah Kabupaten Bangka adalah:

1. Dalam rangka menyelaraskan perencanaan kinerja daerah ke perencanaan kinerja urusan di setiap Perangkat Daerah, Pemkab Bangka telah menyusun *cascading* kinerja mulai dari level sasaran strategis daerah ke sasaran strategis perangkat daerah sampai dengan sasaran masing-masing sub kegiatan, namun *cascading* tersebut belum sepenuhnya tepat menggambarkan strategi atau faktor-faktor penting yang pencapaiannya berpengaruh secara langsung terhadap capaian sasaran strategis daerah atau perangkat daerah, sehingga penetapan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah dipilih belum sepenuhnya efektif dalam pencapaian kinerja;
2. Dalam *cascading* kinerja Perangkat Daerah terdapat indikator kinerja utama Perangkat Daerah, indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum ada penjelasan formulasi penghitungan dan keterangan yang dibutuhkan, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi dan kesulitan dalam pengukuran indikator-indikator kinerja tersebut;
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, perlu adanya keselarasan kinerja pegawai dengan kinerja organisasi (Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah). Pemkab Bangka telah menyusun ukuran kinerja pegawai (SKP) untuk setiap pegawai, namun belum sepenuhnya SKP/kinerja pegawai selaras dengan kinerja organisasi;
4. Pemkab Bangka telah menyusun Laporan Kinerja untuk Pemerintah Daerah dan tiap-tiap Perangkat Daerah secara tepat waktu, namun pemanfaatan laporan kinerja belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terjadi karena belum berjalannya budaya Dialog Kinerja secara optimal antara Pimpinan dan seluruh pegawai untuk membahas analisis capaian kinerja yang dimuat dalam Laporan Kinerja yang perlu diperhatikan agar dapat mencapai target kinerja pada tahun berjalan;
5. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Pemkab Bangka telah mengevaluasi akuntabilitas kinerja internal dan memberikan rekomendasi perbaikan penerapan SAKIP kepada seluruh Perangkat Daerah, namun belum sepenuhnya optimal mendorong perbaikan implementasi SAKIP di setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja, kami kembali merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam menyusun *cascading* kinerja, disarankan dengan menyusun pohon kinerja sebagai alat bantu dalam proses penyelarasan perencanaan untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Dengan pohon kinerja kita dapat mengidentifikasi kondisi-kondisi yang perlu diwujudkan untuk mencapai *outcome*, termasuk strategi-strategi dan aktivitas-aktivitas yang tepat dan perlu dilaksanakan. Hal tersebut juga dapat membantu Pemerintah Daerah dalam memilih dan menetapkan Program,

Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang tepat sesuai Kepmendagri Nomor 50-5889 Tahun 2021;

2. Kepala Perangkat daerah agar melengkapi penjelasan indikator kinerja utama Perangkat Daerah dengan penjelasan yang memadai dan formulasi penghitungan yang tepat untuk tiap-tiap IKU Perangkat Daerah sampai ke indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pengukuran dan pengumpulan data kinerja Perangkat Daerah;
3. Menyelaraskan kinerja individu pegawai dengan kinerja organisasi dengan berpedoman pada PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Melaksanakan budaya "Dialog Kinerja" secara optimal diantaranya dengan membahas analisis dan capaian kinerja dalam laporan kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat mengidentifikasi potensi permasalahan pada tahun berjalan agar target kinerja tahun berjalan dapat tercapai sesuai rencana;
5. APIP agar melaksanakan evaluasi internal dengan lebih optimal, diantaranya melalui peningkatan pemahaman evaluator internal, mampu menangkap permasalahan utama penerapan SAKIP di setiap Perangkat Daerah, dan memberikan rekomendasi yang tepat yang dapat ditindaklanjuti Perangkat Daerah, serta mengkomunikasikan temuan hasil evaluasi dengan baik dan memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.



Deputi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan,

Erwan Agus Purwanto
Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.